WACANA HAM
MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM
EDISI 1 | TAHUN XIX | 2021

MENUJU FESTIVAL HAM 2021

KOTA SEMARANG



PIMPINAN

Komnas HAM Minta TNI dan Polri Hormati dan Lindungi HAM

PEMAJUAN

Merajut Soliditas Seraya Membangun Strategi Pemajuan HAM

PENEGAKAN

Komnas HAM ungkap Peristiwa Karawang

PERWAKILAN

Komnas HAM Pantau Perusakan Lingkungan di Pesisir Jayapura

Dari Menteng

Diskursus tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi perhatian serius dunia internasional. Pada tataran internasional, konsep *human rights cities* (Kabupaten/Kota HAM) mulai dikenalkan guna mendorong pemerintah daerah lebih aktif dan lebih berdaya dalam memajukan dan membangun daerahnya.

Gagasan Kabupaten/Kota merupakan gagasan yang sudah muncul pada tahun 1997 oleh *The People's Movement for Human Rights Learning* (PDHRE). Gagasan ini kemudian tertuang di dalam laporan sidang ke-10 Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2014 yang dikembangkan melalui penyelenggaraan *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF) setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gwangju, Korea Selatan. Forum ini merupakan wadah bagi Kota-Kota di dunia untuk berbagi pengalaman dan inspirasi dalam pengelolaan Pemerintah Daerahnya yang berasaskan hak asasi manusia.

Di Indonesia, konsep Kabupaten/ Kota HAM pun mendapat respon positif. Beberapa Kabupaten/Kota mulai menerapkan konsep tersebut, seperti Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Palu, Kota Bandung, Kabupaten Lampung Timur, dan lain-lain.

Komnas HAM dan INFID sejak tahun 2014 turut merespon dengan menginisiasi penyelenggaraan konferensi Kabupaten/Kota HAM. Pengarustamaan Kabupaten/ Kota HAM menjadi fokus pada konferensi Kabupaten/Kota HAM pada 2014 dan 2015. Pada tahun ketiga, konferensi Kabupaten/Kota HAM mulai dikemas dalam bentuk festival HAM. Tujuannya agar kegiatan konferensi tidak terlihat kaku dan agar bisa melibatkan kalangan yang lebih luas dan lebih heterogen. Hal ini terus berlangsung sampai dengan saat ini.

Pada tahun 2020, karena wabah virus corona (*covid*-19) yang menjadi pandemi global dengan tingkat penyebaran yang sangat massif dan pesat, Festival HAM dilaksanakan secara daring dan luring di Banjarmasin sebagai tuan rumahnya. Penyelenggaraan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus *covid*-19 di Indonesia. Langkah ini ternyata berpeluang meningkatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini, Festival HAM sebagai agenda rutin Komnas HAM, INFID dan mitra kerja lainnya pun masih akan diselenggarakan.

Tim Redaksi Wacana HAM sebagai bagian dari institusi Komnas HAM RI memandang perlu untuk menyampaikan kepada publik terkait persipan yang telah dilakukan bersama dengan mitra kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan Festival HAM 2021, salah satunya pemilihan tuan rumah Festival HAM 2021. Selain itu juga bagaimana usaha yang dilaksanakan oleh tim Festival HAM Bidang Dukungan Penyuluhan dalam rangka bersinergi dengan internal Komnas HAM dan pembelajaran baik yang didapatkan dari pelaksanaan Festival HAM tahun-tahun sebelumnya.

Tim Redaksi sepakat untuk mengangkat artikel "**Menuju Festival HAM 2021**" sebagai laporan utama. Selain itu, tim redaksi juga mengangkat cerita dan refleksi pada rubrik Teropong dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret.

Tim redaksi dalam memilih tema tentu bukan tanpa alasan. Tim redaksi meyakini bahwa memang perlu adanya informasi kepada publik terkait Festival HAM agar inisiatif Kabupaten/Kota HAM dan nilai-nilai HAM lebih tersebarluaskan. (**UPW**)



Daftar Isi

Wacana Utama:
Menuju Festival HAM 2021 | 3-4

Pimpinan:
Komnas HAM Minta TNI dan Polri Hormati dan Lindungi HAM | 5

Penegakan:
- Analis Pengaduan sebagai Garda Terdepan Komnas HAM | 6
- Komnas HAM ungkap Peristiwa Karawang | 7
- Kali Pertama Komnas HAM Lakukan Mediasi *Hybrid* | 8

Pemajuan:
Merajut Soliditas Seraya Membangun Strategi Pemajuan HAM | 9

Perwakilan:
Komnas HAM Pantau Perusakan Lingkungan di Pesisir Jayapura | 10

Reformasi Birokrasi:
Upaya Komnas HAM Menguatkan Organisasi dan Tata Laksana | 11

Teropong:
Hari Perempuan Sedunia, Sebuah Cerita dan Refleksi | 12

Susunan Redaksi

Pengarah:
Beka Ulung Hapsara

Penanggung Jawab:
Mimin Dwi Hartono

Pemimpin Umum:
Liza Yolanda

Pemimpin Redaksi:
Utari Putri Wardanti

Editor:
Rusman Widodo,
Banu Abdillah

Redaksi:
Andri Ratih, Annisa Radhia Muhidha, Feri Lubis, RR Niken Sitoresmi, Nisa Arralinar, Rumpun Mutiarasari S, Dita Verdiana, Jan Hamadi

Koresponden:
Annisa Arum Putri, Rebeca Amelia Susanto, Louvikar Alfan Cahasta, Eka C. Tanlain, Tri Handayani

Artistik:
Andi Prasetyo

Sekretariat:
Novalia Febiola, Yeni Ernawati, Iman Supandi

Alamat Redaksi:
Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B,
Menteng, Jakarta Pusat.
Telp: 021-3925230,
Fax: 021-3925227

@KomnasHAM @komnas.ham Komnas HAM www.komnasham.go.id

Menuju Festival HAM 2021

Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemerintah daerah serta beberapa lembaga pendukung. Awalnya sejak dilaksanakan pada 2014 masih dengan format Konferensi Kabupaten/Kota HAM. Pada tahun ketiga, konferensi Kabupaten/ Kota HAM mulai dikemas dalam bentuk Festival HAM.

Pada 2020 lalu pelaksanaan Festival HAM diselenggarakan secara daring dan luring secara terbatas di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 17-19 Desember 2020. Tema yang diangkat pada saat itu adalah **Menegakkan HAM di Masa Pandemi *Covid-19*: Tantangan dan Solusinya**. Pada waktu itu, Festival HAM diselenggarakan oleh Komnas HAM RI, INFID, Kantor Staf Presiden, dan Pemerintah Kota Banjarmasin serta beberapa lembaga pendukung lainnya.

Festival ini merupakan wadah untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama tentang pelaksanaan HAM Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Festival HAM juga merupakan ruang untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Forum ini menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan inspirasi.

Melangkah ke 2021, persiapan pelaksanaan Festival HAM telah dimulai sejak akhir tahun 2020. Hingga saat ini, masih berlangsung proses pemilihan tuan rumah Festival HAM 2021. Diskusi terkait pemilihan Kabupaten/Kota yang akan menjadi tuan rumah Festival HAM 2021 telah dilakukan oleh lembaga mitra (INFID) di awal tahun 2020.

Kota Semarang dan Kota Bogor merupakan kandidat yang menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2021. Oleh karena itu Komnas HAM, INFID dan KSP sebagai lembaga utama penyelenggara Festival HAM 2021 bersepakat untuk membuka kesempatan bagi Kota Semarang dan Kota Bogor untuk mempresentasikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival HAM 2021.

Komnas HAM, INFID dan KSP sebagai penyelenggara utama Festival HAM telah memiliki indikator penilaian pemilihan tuan rumah. Komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahan, menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian. Komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan/program, rencana aksi yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM atau belum. Selain itu, apakah peraturan Bupati/ Walikota telah berperspektif HAM atau belum, dimulai dari proses penyusunan hingga ke tahap implementasi. Terkait layanan publik, apakah pembangunan di Kabupaten/Kotanya telah memperhatikan kelompok-kelompok minoritas. Misalnya apakah akses terhadap penyandang disabilitas sudah tersedia, apakah tersedia mekanisme untuk menyalurkan aspirasi warga, lalu adakah praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Hal ini terkait dengan kesiapan anggaran untuk penyelenggaraan, kesiapan daya dukung Kabupaten/Kota (akomodasi, transportasi, infrastruktur dan teknologi informasi).



Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara dan Wakil Walikota Bogor, Didie A. Rachim, saat menghadiri presentasi tuan rumah Festival HAM 2021 di Kantor Komnas HAM RI pada Senin, (01/02/2021).

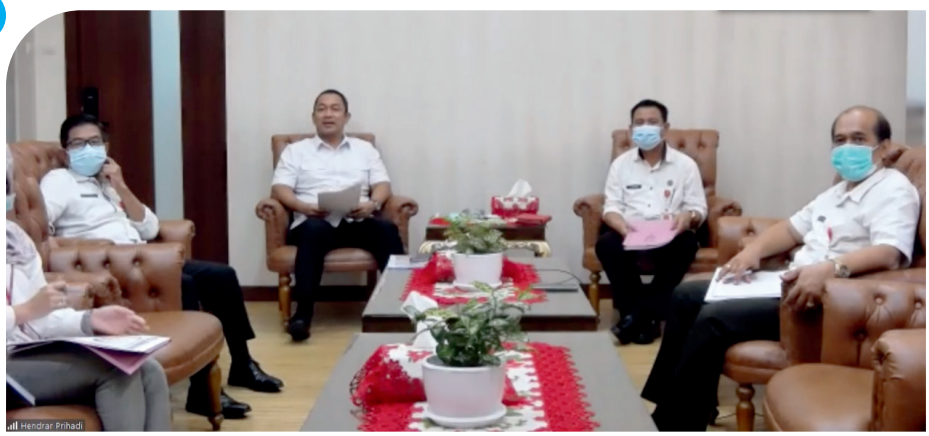
Penting untuk dipahami bahwa Kabupaten/Kota yang telah atau akan menjadi tuan rumah Festival HAM, bukan berarti telah sepenuhnya menjadi Kabupaten/Kota berperspektif HAM. Kabupaten/Kota HAM adalah konsep yang berdasar pada *on going procces*. Komitmen dan realisasi secara progresif Kabupaten/ Kota tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penentuan tuan rumah Festival HAM. Hal ini menjadi penanda penting dalam proses transformasi menjadi Kabupaten/Kota HAM.

Pemerintah Kota Bogor dan Kota Semarang telah melakukan presentasi yang mengandung unsur diantaranya komitmen, rencana aksi dan kebijakan/ program terkait hak asasi manusia agar proses pemilihan tuan rumah ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Hal ini merupakan bagian dari indikator-indikator yang telah disepakati bersama sebagai acuan menjadi tuan rumah Festival HAM.

Pemerintah Kota Bogor terlebih dahulu melakukan presentasi pada 1 Februari 2021 di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam presentasi itu hadir Wakil Waikota Bogor, Didie A. Rachim yang menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bogor sebagai tuan rumah Festival HAM 2021. Dalam presentasinya, Ia menyampaikan kelebihan dan tantangan yang dimiliki Kota Bogor. Terkait permasalahan HAM yang ada di Bogor, ia akan berusaha menyelesaikan hal tersebut. "Kota Bogor sudah melakukan beberapa langkah untuk menuju kota ramah HAM, saya optimis Kota Bogor layak menjadi tuan rumah Festival HAM 2021 dari upaya-upaya yang telah dilakukan kota Bogor," ujar Didie.

Didie juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bogor telah membuat Pokja dan telah bekerjasama dengan Imparsial untuk mempersiapkan Festival HAM di Kota Bogor. Ia juga mengatakan bahwa Kota Bogor telah mengupayakan penyelesaian kasus-kasus intoleran seperti membuat Tim Tujuh untuk penyelesaian kasus GKI Yasmin. Perlu diketahui Kota Bogor memang belum menyelesaikan kasus intoleran terkait perizinan pendirian tempat ibadah GKI Yasmin. Kasus ini berawal dari dibekukannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) pada 2008. Gereja ini teretak di Jalan KH.R. Abdullah Bin Nuh, Curug Mekar, dekat perumahan Yasmin, Bogor.

Pemerintah Kota Bogor juga meyakinkan akan berusaha lebih baik sebagai kota



Walikota Semarang, Hendrar Prihadi (tidak memakai masker) saat memaparkan presentasi tuan rumah Festival HAM 2021 yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting pada Rabu (03/02/2021).

ramah HAM dengan menurunkannya dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan perizinan untuk ramah penyandang disabilitas. Kantor-kantor pemerintah juga sudah menyediakan ruang-ruang yang ramah disabilitas. Ia juga menyampaikan kota Bogor telah menyiapkan aturan-aturan untuk mendukung penyandang disabilitas. "Kota Bogor ingin membuktikan diri sebagai kota yang toleran dengan menjadi tuan rumah di Festival HAM 2021," tegas Didie.

Pemerintah Kota Semarang memberikan presentasinya pada 3 Februari 2021. Presentasi dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Hendrar Prihadi, Walikota Semarang, menyampaikan kesiapan Kota Semarang sebagai tuan rumah penyelenggara Festival HAM 2021. Ia juga memaparkan kondisi dan situasi di Kota Semarang seperti keragaman, lalu lintas, akomodasi, dan penginapan yang dirasa sangat mendukung penyelenggaraan Festival HAM.

Hendrar melanjutkan pemaparannya terkait pilihan format penyelenggaraan Festival HAM 2021 yang kemungkinan masih dalam masa pandemi. Format yang dimaksud antara lain Festival HAM akan mengundang 2000 peserta secara luring; Festival HAM akan dilaksanakan secara *hybrid*, perpaduan daring dan luring; atau Festival HAM akan dilakukan sepenuhnya secara daring bila kondisinya masih dalam masa pandemi.

"Kota Semarang siap secara profesional sebagai tuan rumah Festival HAM 2021," ujar Hendrar. Ia melanjutkan, terkait keterlibatan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang akan mengajak segala lapisan dan unsur masyarakat untuk bergabung dalam Festival HAM 2021. Dari sisi anggaran, Pemkot Semarang telah mengalokasikan APBD-nya untuk Fesival HAM apabila dilakukan sesuai jadwal yakni pada bulan November 2021. "Kota Semarang memiliki pengalaman sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara-acara besar, sehingga apabila Festival HAM 2021 diselenggarakan di Kota Semarang, gaungnya akan terdengar," pungkas Hendrar.

Komnas HAM mengapresiasi keterlibatan Pemkot Bogor dan Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM. "Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas keterlibatan Pemerintah Kota Bogor dan Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021," ujar Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan saat menghadiri presentasi masing-masing Pemkot.

Komnas HAM, INFID dan KSP telah mendiskusikan dan memutuskan Kota mana yang akan menjadi tuan rumah Festival HAM 2021 (8/3). Pemilihan tuan rumah Festival HAM 2021 berdasarkan pada presentasi kebijakan, program/ rencana aksi dalam pemajuan serta perlindungan HAM yang disampaikan. Berdasarkan hasil diskusi, ketiga lembaga secara bulat memilih Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021. Pemilihan ini berdasarkan atas pertimbangan karena Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan rencana aksi untuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2021; telah mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan dan program pembangunan dan berkomitmen untuk terus memperbaiki perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; serta telah masuk dalam anggota *Open Government Partnership* (OGP) lokal 2020, bekerja bersama dengan masyarakat sipil.

Persiapan Internal Komnas HAM

Pemilihan tuan rumah penyelenggara merupakan salah satu tahapan dari Festival HAM. Komnas HAM sendiri secara internal telah melakukan persiapan melalui evaluasi internal pelaksanaan Festival HAM 2020, penyusunan tim dan PIC Festival HAM 2021, serta penyusunan anggaran penyelenggaraan Festival HAM 2021.

Dalam forum evaluasi Festival HAM 2020, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menekankan bahwa evaluasi dilakukan tidak hanya untuk melihat dari aspek teknis, namun juga dari aspek substansinya, termasuk apakah visi dan tujuan strategis dari Festival HAM sudah tercapai. Secara substansi masih perlu ditingkatkan, dengan membahas apa tujuan strategis dari Festival HAM.

> ***"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas minat dan partisipasi Pemkot Bogor dan Pemkot Semarang sebagai calon tuan rumah Festival HAM 2021***

Berdasarkan isu strategis, Komnas HAM pada dasarnya ingin menempatkan Pemerintah daerah sebagai salah satu garda terdepan dalam perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Isu ini kemudian dikaitkan dengan konsep *Human Rights Cities*. Festival HAM tidak hanya *ceremony*, namun juga sebagai media memperkuat peran Pemda dalam perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Perlu dilakukan kajian yang lebih agar Festival HAM bisa menjadi *public discourse* nasional.

Komisioner Mediasi, Hairansyah pun menyampaikan beberapa catatannya. Dari segi substansi, perlu dipikirkan bagaimana pemilihan tuan rumah Festival HAM. Tidak hanya terkait kesediaan Pemerintah Daerah, namun juga penting untuk dilihat apa saja praktik baik dari tuan rumah tersebut yang dapat dicontoh oleh Kabupaten/Kota lain.

Penyusunan PIC dan tim telah dilakukan sejak November 2020, bahkan sebelum Festival HAM 2020 dilaksanakan. Louvikar Alfan Cahasta sebagai PIC Festival HAM 2021 mengungkapkan bahwa harapan terbesarnya agar tujuan, *output* dan *outcome* kegiatan dapat tercapai.

"Harapannya Festival HAM 2021 bisa menjadi ruang dialog multipihak untuk mewujudkan Kabupaten/ Kota yang memiliki perspektif HAM, meningkatkan *awareness* publik mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai HAM di *level* lokal, juga menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam tata kelola pemerintahan di wilayahnya bersandar pada hak asasi manusia," tegas Alfan. (**FL/ UPW/LAC/Ibn**)

Komnas HAM Minta TNI dan Polri Hormati dan Lindungi HAM



Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2021 di Mabes Polri Jakarta, Senin, (15/2/2021).

Komnas HAM berharap TNI dan Polri berperan aktif dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. TNI dan Polri memiliki andil besar untuk menjaga dan menjalankan amanat reformasi demi menuju TNI dan Polri yang lebih profesional dengan menjunjung tinggi dan memuliakan HAM.

"TNI-Polri perlu tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi berlandaskan norma dan standar hak asasi manusia," ungkap Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2021 di Mabes Polri Jakarta, Senin, (15/2/2021). Kesempatan ini merupakan kali pertama Komnas HAM diundang untuk berbicara dalam forum luring dan daring yang diikuti oleh petinggi TNI-Polri.

Taufan mengungkapkan harapannya agar TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di lapangan dapat melakukan langkah-langkah yang efektif, terukur dan sesuai dengan standar dan norma HAM. Taufan juga mendorong agar TNI dan Polri mengoptimalkan pendekatan dialogis dengan kemampuan komunikasi dan diplomasi publik yang dapat menjadi *soft power* dalam lingkup tata pergaulan nasional dan global. Hal ini menjadi cukup efektif untuk merekatkan hubungan sosial dengan seluruh lapisan masyarakat.

Komnas HAM juga tak jemu mendorong komitmen TNI-Polri dalam melindungi dan menjadi bagian dalam pemenuhan hak asasi manusia. TNI merupakan komponen utama pertahanan Negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada hari berikutnya, yakni pada Rapat Pimpinan TNI, Selasa (16/2/2021), Taufan mengungkapkan bahwa TNI berperan penting untuk menjaga kedaulatan bangsa baik di darat, laut, dan udara, dari berbagai macam bentuk ancaman dan serangan, baik yang sifatnya *hard threats* maupun *soft threats*. "Bagi Komnas HAM, fungsi TNI sangat penting di dalam menjaga pertahanan Negara, menjaga kedaulatan dan menjaga situasi dalam negeri kita yang penuh gejolak," ujarnya.

Rapim yang diselenggarakan di Markas Besar TNI Cilangkap ini dihadiri pula oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Taufan pun menjelaskan bahwa fungsi-fungsi TNI sebenarnya sudah melakukan tugas pemenuhan hak asasi manusia. "Pemenuhan hak atas kesehatan contohnya. Dalam hal ini, tugas TNI yang dijalankan dalam penanganan *Covid-19* atau penanganan banjir dan bencana alam maupun bencana non-alam, sebenarnya adalah tugas dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kesehatan, pendidikan, layanan dukungan logistik adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan," urai Taufan.

Taufan menyambut baik reformasi kelembagaan dalam tubuh TNI yang menurutnya harus senantiasa ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar fungsi-fungsi profesional TNI dapat berjalan semakin baik. Salah satunya dengan memasukkan standar, norma dan nilai-nilai HAM dalam pendidikan, pelatihan, dan pembekalan para personil TNI sehingga terhindar dari praktik-praktik yang melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Ia pun mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin besar. Pendekatan dialogis dan persuasi juga dapat dikedepankan untuk menghadapi tantangan dari berbagai elemen. Pasukan TNI sering terlibat dalam misi perdamaian dunia, hal ini menjadi modalitas yang baik untuk itu.

"Kami percaya TNI kita punya kapasitas dan SDM yang mampu melakukan pendekatan dialogis. Indonesia, khususnya pasukan TNI memiliki berbagai prestasi ketika terlibat dalam perdamaian dunia. Artinya ada potensi dari TNI untuk juga melakukan pendekatan-pendekatan dialogis kepada elemen-elemen masyarakat yang bergejolak,"jelasnya.

TNI, mulai dari jajaran tertinggi hingga prajurit di lapangan merupakan garda terdepan yang harus berpegang teguh pada profesionalisme, kepatuhan hukum, dan menjunjung tinggi HAM. "Jati diri TNI adalah pelindung negara dan pelindung rakyat Indonesia. Untuk itu hak asasi manusia rakyat Indonesia juga sebetulnya bagian dari tugas penting TNI sehingga rakyat Indonesia terlindungi dari kemungkinan mengalami pelanggaran hak asasi manusia," pungkas Taufan. (**AAP/UPW/Ibn**)

Analis Pengaduan sebagai Garda Terdepan Komnas HAM



Ruang Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan adalah garda terdepan pelayanan publik Komnas HAM dalam pengaduan dan konsultasi. Hal tersebut sesuai dengan mandat Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan Komnas HAM untuk menerima pengaduan dari setiap orang atau sekelompok orang yang merasa hak asasinya terlanggar.

Berbagai jenis pengaduan pernah diterima oleh Komnas HAM. Salah satunya yang terjadi pertengahan Februari 2021. Kala itu petugas keamanan Komnas HAM menerima kedatangan seorang perempuan dengan menggunakan taksi online, Minggu, 14 Februari malam. Perempuan yang berpenampilan rapi tersebut datang dengan membawa sebuah koper berukuran besar dan menyampaikan ingin mengadu ke Komnas HAM. Karena Komnas HAM tidak membuka layanan pengaduan pada hari Minggu maka yang bersangkutan mengatakan ingin menunggu. Pengadu tersebut diijinkan untuk menunggu hingga Senin pagi.

Keesokan paginya, perempuan berinisial ID yang diketahui berusia 28 tahun tersebut ditemui oleh Tri Handayani dan Nur Cahyani, Analis Pengaduan yang bertugas. Kepada keduanya, ID menyampaikan bahwa dirinya merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia, karena ada pemerintah asing telah melakukan penyadapan dan penggandaan terhadap otaknya sejak tahun 2017. ID menjelaskan bahwa dia juga telah melaporkan perkara tersebut ke Tim Siber Bareskrim Mabes Polri dan Badan Intelejen Nasional pada 2020, dan sedang menunggu pembayaran kompensasi.

Menanggapi pengaduan tersebut, Tri dan Iis (sapaan akrab Nur Cahyani) menyarankan Pengadu untuk kembali ke rumahnya, namun yang bersangkutan menolak dengan alasan tidak harmonis dengan orang tuanya. Saat ditanyakan lebih mendalam terkait salinan identitas dan alamat, ID justru menangis. Hingga akhirnya ID bermalam lagi di Komnas HAM dengan menempati salah satu bilik pengaduan.

Analis Pengaduan yang bertugas keesokan harinya, Nisa Arralinar dan Tri Handayani kembali menemui ID untuk menanyakan keadaan dan membujuknya untuk pulang ke rumah, namun yang bersangkutan tetap tidak ingin pulang dan kembali menjelaskan kasusnya. Karena merasa dirinya merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia, maka dirinya harus tinggal di Komnas HAM hingga menerima kompensasi.

Saat konsultasi pengaduan, baru diketahui bahwa yang bersangkutan pernah mengadukan kasusnya melalui layanan *Whatsapp* Pengaduan. Setelah dilakukan pelacakan, diketahui bahwa ID pernah berkonsultasi dengan mencantumkan alamat domisilinya. Hingga akhirnya Analis Pengaduan dapat menghubungi pihak Kelurahan dan mendapatkan informasi bahwa orang tua ID telah melaporkan anaknya yang tidak kembali ke rumah selama 2 hari.

Setelah koordinasi tersebut, orang tua ID datang ke Komnas HAM untuk menjemput pada sore harinya. Dari orang tua, diketahui bahwa ID adalah lulusan Fakultas Hukum, dan merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi di kampusnya, serta pernah magang di beberapa kantor advokat. ID mengalami gangguan psikologis sejak tahun 2018 dan selalu pergi melapor ke instansi-instansi pemerintah terkait kasusnya, namun selalu pulang ke rumah pada sore harinya.

Saat bertemu dengan orang tuanya, ID justru marah dan menolak untuk diajak pulang. Berulang kali ID mengatakan bahwa dirinya sedang terlibat masalah hukum dan sudah dewasa sehingga tidak memerlukan pengawasan orang tua. Proses membujuk ID pun terbilang memakan waktu cukup lama. Hingga akhirnya setelah 2 jam berlalu, Analis Pengaduan memutuskan untuk berkoordinasi dengan Kementrian Sosial untuk proses pemulangan.

Malam harinya, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial tiba di Komnas HAM. Setelah dilakukan *assessment* singkat terhadap ID dan orang tuanya, disimpulkan sementara bahwa ID mengalami *skizofrenia*. Hingga akhirnya, TRC Kementerian Sosial membawa ID ke Panti Sosial Tresna Werdha Mulya Jaya untuk menjalani *assessment* lebih lanjut.

Kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Komnas HAM sudah sering kali menerima pengaduan dari orang yang merasa dirinya disadap maupun ditanam *chip* dalam tubuhnya oleh badan intelejen. Belajar dari pengalaman tersebut, penting bagi Analis Pengaduan untuk dibekali kemampuan berhadapan dengan orang berkebutuhan khusus. Mengingat berhadapan dengan orang yang memiliki gangguan psikologi cenderung membutuhkan kesabaran yang ekstra dan teknik khusus untuk mematahkan halusinasinya. (**NA/TH/Ibn**)

Komnas HAM Ungkap Peristiwa Karawang

Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM telah mengungkap peristiwa Karawang. Kasus ini diungkap melalui Tim untuk Penyelidikan Peristiwa Karawang yang telah mengakibatkan kematian 6 (enam) orang Laskar Khusus FPI. Peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari ini melibatkan anggota tim dari Polda Metro Jaya di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

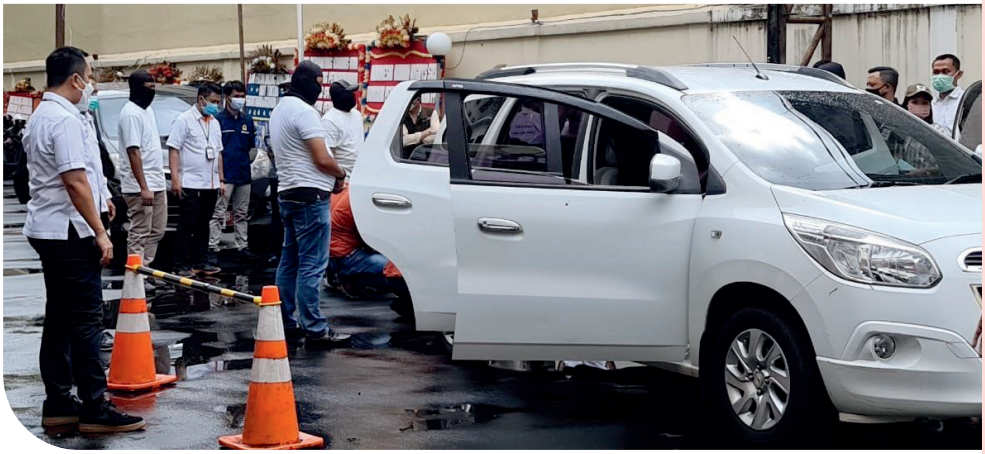
Tim Karawang bergerak cepat untuk meminta keterangan dan informasi kepada beberapa pihak seperti Bareskrim Polri, FPI, dan juga Jasamarga. Tim juga telah mendapatkan beberapa barang bukti yang berdasarkan pada Pemantauan Lapangan dan dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya tim melakukan pengujian dengan menghadirkan beberapa ahli. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas kerja, tim telah melakukan konferensi pers terkait perkembangan penyelidikan dan temuan sementara kepada masyarakat di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2020).

"Selama proses penyelidikan Komnas HAM telah mendapatkan beberapa fakta terutama tersebarnya informasi yang disebarkan oleh banyak orang yang sebagian besar adalah hoaks. Kami melihat ada yang berupaya mencampuradukan keterangan Komnas HAM dengan keterangan lain. Masyarakat harus berhati-hati hoaks dengan seperti ini," ungkap Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin saat konferensi pers.

Tim mempercepat proses penyelidikan dengan melakukan konsinyering penyusunan laporan hasil penyelidikan pada tanggal 29 – 31 Desember 2020. Tim Penyelidikan telah mendapat masukan dan perbaikan-perbaikan hasil dari diskusi. Berdasarkan diskusi tersebut, sebelum mencapai hasil akhir, tim membutuhkan beberapa keterangan tambahan dari Kepolisian juga terkait rekonstruksi peristiwa kematian 6 (enam) orang laskar khusus FPI tersebut.

Pemanggilan Bareskrim Polri guna pendalaman keterangan dilakukan pada 4 Januari 2021. Bareskrim Polri menghadirkan tim Puslabfor, Siber, Polda Metro Jaya, dan juga petugas lapangan yang bertugas langsung pada saat kejadian. Selanjutnya tim melakukan pendalaman keterangan-keterangan terkait barang bukti ponsel milik korban dan kesesuaian keterangan petugas dengan barang bukti yang ada. Rekonstruksi dilakukan di halaman parkir Komnas HAM bersama dengan petugas yang bertugas saat kejadian.

Berdasarkan *raw material* yang ada, pada 6 Januari 2021 tim melakukan finalisasi penyusunan laporan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Tim melakukan pemaparan laporan yang telah disusun, kemudian menerima masukan melalui diskusi dengan Komisioner dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga Laporan Penyelidikan Peristiwa Karawang yang mengakibatkan kematian 6 (enam) Orang Laskar FPI dapat selesai.



Suasana rekonstruksi pendalaman peristiwa yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Pada Selasa, (8/1/2021) Komnas HAM menggelar Konferensi Pers untuk penyampaian hasil Investigasi atau Penyelidikan Tim Peristiwa Karawang kepada Media dan Masyarakat. Sebagai Ketua Tim, M. Choirul Anam mengungkapkan beberapa rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus tersebut, diantaranya adalah:

1. Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM, oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.
2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil avanza hitam B 1739 PWQ dan avanza silver B 1278 KJD.
3. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.
4. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Komnas HAM kemudian secara khusus bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor,Kamis (14/1/2021). Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyerahkan dan membahas "Laporan Penyelidikan Komnas HAM RI Terkait Peristiwa Kematian 6 Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat".

Usai menyerahkan laporan kepada Presiden yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, para Komisioner Komnas HAM kemudian menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat.

Komnas HAM selanjutnya juga melakukan pertemuan dengan Bareskrim Polri pada Selasa (16/2/2021), untuk menyerahkan laporan hasil penyelidikan dan barang bukti yang didapat oleh Tim Penyelidik Komnas HAM. Dalam pertemuan ini internal Komnas HAM dihadiri oleh Ketua Tim, M. Choirul Anam, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal, Amiruddin dan Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Beka ulung Hapsara. Dari pihak Bareskrim Polri diwakili oleh Dirtipidum, Brigjen Andi Rian Djajadi dan Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri, John Weynath.

Komnas HAM menyerahkan 16 (enam belas) barang bukti kepada Bareskrim Polri dengan harapan dapat membantu penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polri. Seluruh barang bukti ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

"Kami berharap setelah penyerahan barang bukti ini semakin memperkuat dan memperjelas peristiwa yang terjadi sehingga laporan yang telah kami serahkan kepada Presiden, Kapolri dan jajarannya, dengan cepat diselesaikan. Dan yang tidak kalah penting akuntabiltas dan transparansi kasus ini, sehingga semua orang bisa memahami apa yang terjadi dan tidak ada keraguan lagi di masyarakat." pungkas Taufan dalam penyerahan barang bukti kepada Bareskrim. (**Bex/Ibn**)

Kali Pertama Komnas HAM Lakukan Mediasi *Hybrid*

Awal tahun 2021, pandemi virus *corona (covid-19)* nyatanya masih belum selesai. Situasi ini masih berdampak pada hampir semua sektor kehidupan. Semua kegiatan hampir di semua sektor menjadi berkurang atau bahkan terhenti sementara. Namun demikian, di sektor hukum, problematika akan selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Terhadap persoalan-persoalan yang timbul tersebut tentu memerlukan adanya mekanisme penyelesaian untuk mewujudkan keadilan demi kemaslahatan bersama, baik penyelesaian di lembaga Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Berbicara soal konflik atau sengketa, mediasi merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi mediasi, yang dilaksanakan oleh Subkomisi Penegakan HAM, Bidang Mediasi.

Fungsi mediasi Komnas HAM sebagai salah satu solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian di luar proses litigasi yang sifatnya berlawanan (*adversarial*). Di sini para pihak saling berargumen baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain. Dalam pelaksanaan mediasi, Komnas HAM menuntut adanya itikad baik dari para pihak agar terwujud proses mediasi yang sungguh–sungguh dan berkualitas sehingga dapat mendorong potensi keberhasilan dan mencapai kesepakatan perdamaian.

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Hairansyah, yang juga sebagai Komisioner Mediasi bertugas sebagai Mediator untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa melalui perundingan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh Komediator yakni staf Komnas HAM.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi membuat sebagian besar kegiatan menggunakan media daring yang juga mempengaruhi jalannya proses mediasi. Pada kondisi ini, mediator harus bisa beradaptasi bagaimana melakukan mediasi dengan teknologi, namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Setidaknya ada beberapa tantangan yang akan muncul dalam melaksanakan mediasi secara daring di era *new-normal*. Keamanan kerahasiaan mediasi *via online* masih rawan *hacking* dan penyadapan. Selain itu, terkait dengan kualitas jaringan internet, komunikasi non-verbal yang mungkin kurang terdeteksi, kurangnya empati dalam proses mediasi daring, sarana prasarana



Komisioner Mediasi, Hairansyah saat melaksanakan mediasi Hybrid untuk pertama kalinya di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta.

yang harus lebih ditingkatkan, serta terkait penandatanganan kesepakatan.

Selain tantangan yang dihadapi, terdapat juga hal positif dari melakukan mediasi secara daring. Hal tersebut seperti dapat menembus keterbatasan ruang dan waktu serta lebih hemat biaya.

Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi, pada tahun ini untuk pertama kalinya melakukan model mediasi *hybrid* (perpaduan *offline* dan *online* di waktu yang sama). Mediasi dilakukan terkait kasus dugaan *Union Busting* dan PHK antara Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia Senayan (SPM HMS) sebagai Pengadu dan Manajemen Hotel Mulia Senayan sebagai Teradu. Pihak Pengadu serta pihak dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta hadir langsung di Kantor Komnas HAM (*offline*), sementara Pihak Teradu meminta untuk hadir dan dilakukan secara online karena kondisi pandemi.

Berdasarkan pengaduan yang masuk, kasus ini terkait adanya dugaan menghalang-halangi kebebasan berserikat (*Union Busting*) terhadap pengurus dan anggota SPM HMS. Penghalangan kebebasan berserikat tersebut terkait dengan adanya pembentukan SPM HMS pada Juni 2020 yang berujung pada PHK terhadap Ketua SPM dari Manajemen Hotel Mulia Senayan. Selain itu, pengurus serta anggotanya mendapatkan pengawalan ketika bekerja dan diminta untuk keluar dari SPM HMS.

Sebelumnya, telah dilakukan mediasi pertama pada Januari 2021 antara Pengadu dan Teradu dengan mediator serta komediator dari Komnas HAM. Pada mediasi tersebut para pihak sepakat untuk menunda perundingan mediasi terhadap penyelesaian sengketa tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Perundingan. Hal itu dilakukan guna memberikan waktu kepada pihak Teradu untuk mendiskusikan kembali terkait permintaan dari pihak Pengadu. Penundaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati para pihak.

Pada mediasi pertama ini, masih terdapat beberapa kendala seperti belum maksimalnya jaringan internet serta sarana dan prasarana penunjang. Kendala ini berpengaruh pada kurang tergambarnya suasana psikologis yang terjadi di dalam ruang mediasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bidang Mediasi untuk perbaikan kedepannya.

Pada Februari 2021, mediasi *hybrid* kembali dilanjutkan untuk mencari penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tersebut. Koordinasi dengan Biro lain yang lebih baik membuat persiapan jauh lebih matang. Meskipun terbatas, mediasi lanjutan ini dapat berjalan jauh lebih baik dan lancar. Proses mediasi diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Tanpa Kesepakatan yang ditandatangani oleh Mediator, Juru Runding SPM HMS dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dan kasus dinyatakan ditutup oleh Bidang Mediasi untuk dilimpahkan penanganannya melalui Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

Mediasi *hybrid* yang telah dilakukan menjadi hal baru sekaligus pembuka jalan bagi Komnas HAM. Subkomisi Mediasi Komnas HAM dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi dan harus tetap memperjuangkan hak-hak dari para pengadu. Mediasi *hybrid* ini menjadi momentum penting bagi Komnas HAM, karena dari pengalaman tersebut dapat dianalisa hal-hal apa yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Diperlukan kerjasama dan sinergi antar Biro di Komnas HAM untuk mendukung kelancaran proses mediasi. (**RMS/ UPW/Ibn**)

Merajut Soliditas Seraya Membangun Strategi Pemajuan HAM



Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM serta Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM saat menghadiri Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM di Swiss-Bell Hotel, Bogor pada Senin, (22/02/2021).

Biro Dukungan Pemajuan HAM yang memiliki fungsi pengkajian dan penelitian serta pendidikan dan penyuluhan berperan strategis dalam pencapaian visi dan misi Komnas HAM. Hal ini tentunya terus menerus diupayakan dengan menjalankan berbagai program kerja secara tepat bagi pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menekankan peran strategis ini dalam sambutan pembukanya pada Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM yang dilaksanakan pada 22-23 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat. "Tantangan bagi pemajuan dan penegakan HAM sangat nyata, untuk itu peran dari seluruh jajaran Biro Pemajuan HAM menjadi sangat strategis di tengah situasi penegakan HAM yang stagnan," ujar Taufan di hadapan sekitar 70 orang peserta raker yang hadir secara langsung dan daring.

Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa dari lima sasaran strategis Komnas HAM yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, tiga diantaranya diampu oleh fungsi pemajuan HAM yang secara teknis dan administrasi dilaksanakan oleh Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Untuk mendukung itu semua, Komisioner Beka Ulung Hapsara, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, menekankan soliditas dengan meminta kerja sama dan koordinasi yang semakin erat seluruh elemen khususnya yang ada dalam Biro Dukungan Pemajuan HAM dan juga Biro lainnya di Komnas HAM. Ia juga sekaligus menyampaikan catatan evaluasinya terhadap sistem kerja daring pada situasi pandemi *covid-19* yang menurutnya dengan berbagai inovasi dapat dijadikan peluang untuk menjangkau khalayak lebih luas .

Posisi tawar Komnas HAM juga menurut Beka dapat menjadi peluang bagi Biro Dukungan Pemajuan HAM. "Komnas HAM mulai mendapat ruang, yang memang kita harapkan bersama, posisi tawarnya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat misalnya dalam pengambilan kebijakan. Juga soal peluang kerja sama yang lebih banyak. Misalnya membuka komunikasi lebih lebar dengan TNI-Polri. Tetapi posisi tawar yang baik ini tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan kerja-kerja yang baik, yang menuntut profesionalisme dan kedisiplinan kita untuk *output* atau produk kita," sambung Beka.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab dalam sambutannya, mengibaratkan fungsi penyuluhan Komnas HAM sebagai "etalase" lembaga di mata publik. "Mengapa kita butuh etalase ini menjadi baik? Karena bisa mempertunjukkan isi dari Komnas HAM ke depan. Penyuluhan, satu sisi pelatihan dan di sisi lain sebagai kampanye (hak asasi manusia-red). Bagaimana kita mengenalkan baik gagasan maupun tampilan dari Komnas HAM kepada publik," ujarnya. Ia lantas memberi semangat bagi para personil Biro Dukungan Pemajuan HAM untuk senantiasa kreatif dan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjawab tantangan dari situasi terkini.

Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, mengapresiai capaian pemajuan HAM selama 2020 dan meminta agar terus ditingkatkan capaian yang baik dengan semangat yang positif meski bekerja dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Salah satu hal yang dihasilkan di tahun 2020 misalnya adalah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri, memaparkan pengalaman bekerjasama dengan Komnas HAM dalam menyusun Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada tahun 2019-2020, serta mengimplementasikannya dalam mendorong perumusan kebijakan di Kota Bogor dan Kulonprogo. "SNP berperan dalam memberikan panduan dalam menafsirkan peristiwa HAM dan mendorong adanya kebijakan yang selaras dengan HAM," ujar Ghufron pada sesi pemaparan narasumber dalam kesempatan yang sama.

Raker yang berlangsung 2 (dua) hari tersebut berhasil menyusun rencana kerja setiap program dan mekanisme kerjasama untuk mendorong pemajuan HAM yang lebih efektif, termasuk dengan kantor-kantor perwakilan. Selain itu, juga disusun metode *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan bahwa program selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Komnas HAM.

Para kepala kantor perwakilan Komnas HAM di Propinsi Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat yang hadir secara daring pun turut mencurahkan pendapat dalam kesempatan ini. Mereka menyampaikan dukungannya dalam upaya penguatan sinergi untuk fungsi pemajuan HAM. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan kerja Komnas HAM di seluruh Indonesia. Bagi mereka, mengejawantahkan sinergi itu dapat dilasanakan dalam relasi yang erat, komunikasi yang intensif serta mekanisme koordinasi yang sistematis antara Biro Dukungan Pemajuan HAM dengan ke-enam Kantor Perwakilan Komnas HAM.

Meski dinamika dan tantangan selalu hadir, pemajuan hak asasi manusia harus selalu terus menerus diupayakan. Soliditas, optimisme dan kontribusi aktif semua elemen menjadi kunci utamanya. **(AAP/MDH/Ibn)**

Komnas HAM Pantau Perusakan Lingkungan di Pesisir Jayapura



Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan Pemantauan pada hutan bakau dan hutan sagu di wilayah Pantai Hamadi dan Pantai Holtekam di sekitar Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Papua.

Pada Februari 2021 Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Pnt Frits Ramandey, bersama dengan staf melakukan pemantauan pada hutan bakau dan hutan sagu di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekam di sekitar Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Saat melakukan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan Februari 2021, Komnas HAM menemukan 16 titik perusakan hutan bakau dan 12 titik lokasi perusakan hutan sagu di sepanjang Jalan Hamadi-Holtekam, Kota Jayapura.

Kondisi ekosistem hutan bakau di kawasan Teluk Youtefa yang terus terdegradasi akibat roda pembangunan menjadi perhatian Komnas HAM Papua. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, kondisi ini diyakini akan memunculkan ancaman serius dan patut menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat pemilik ulayat. Kondisi ini tidak dapat terus dibiarkan karena akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat umum.

“Bencana banjir yang pernah melanda Entrop Distrik Jayapura Selatan maupun Kota Jayapura kemudian terjadi luapan air di sejumlah titik menggambarkan bahwa kondisi pembangunan yang tidak seimbang dengan kondisi lingkungan. Perubahan lingkungan begitu cepat dan tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi,” kata Frits.

Lebih lanjut Fritz menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak pada kondisi sosial dan budaya. Ada ancaman hilangnya nilai - nilai tradisi akibat perubahan. Komnas HAM memiliki kepentingan untuk memastikan tidak ada hak asasi yang dilanggar, sebab hak hidup warga atas lingkungan yang bersih dan lestari, merupakan bagian dari HAM.

“Wilayah Pantai Hamadi dan Holtekam ini kawasan konservasi. Kawasan lindung untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Kawasan ini menjadi penyanggah untuk mencegah terjadinya bencana semisal banjir, abrasi dan lainnya. Hutan bakau juga menjadi rumah bagi berbagai biota laut,” jelasnya.

Sekitar 500 meter setelah Jembatan Yotefa ke arah Holtekam, hutan bakau di pinggiran teluk Yotefa itu mulai menipis. Di beberapa bagian masih ada yang sepanjang satu kilometer. Akan tetapi ada yang terisasa 100 meter, 30 meter hingga 10 meter.Sebagian kawasan hutan bakau sudah ditimbun oleh pengembang. Terdapat banyak sampah di sekitar hutan. Di bagian depan telah menjadi kawasan wisata Perubahan di sana terjadi akibat alih fungsi lahan.

Di sekitar Holtekam, Distrik Muaratami pun didapati pengrusakan hutan sagu pada beberapa titik. Padahal hutan sagu berfungsi sebagai penyangga air dan makanan pokok bagi warga asli sekitar.

“Kami belum tahu akan dialih fungsikan untuk apa, karena belum ada bangunan di sana, akan tetapi sudah mulai ditimbun,” ujar Fritz.

Rusaknya hutan bakau dan hutan sagu di sekitar Pantai Hamadi, Kota Jayapura, tidak hanya berpotensi menyebabkan terjadi bencana, dan hilangnya tempat berlindung berbagai biota laut. Situasi ini juga menyebabkan warga asli di sana kehilangan tempat mencari kebutuhan hidup sehari hari.

“Kalau sampai pengembang mengubah peruntukan hutan bakau dan hutan sagu untuk pembangunan perumahan secara besar besaran misalnya, akan semakin berdampak pada pencemaran kawasan sekitar dari limbah atau sampah rumah tangga,” tegasnya.

John Dominggus Kalor dari Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih pernah meneliti mangrove di Teluk Youtefa pada 2017. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Biodiversity 2018 tersebut menyebutkan, mangrove di Teluk Yotefa kini termasuk dalam kategori tidak sehat. Mangrove tidak bisa menjadi tempat pemijahan ikan jika dipenuhi sampah. Di pesisir mangrove di depan kampung Enggros terdapat daerah-daerah yang di dasarnya bukan substrat pasir, tapi sampah.

> “***Kami belum tahu akan dialih fungsikan untuk apa, karena belum ada bangunan di sana, akan tetapi sudah mulai ditimbun***

Komnas HAM perwakilan Papua berharap Pemkot Jayapura dapat sesegera mungkin melakukan *sweeping* terhadap pembangunan yang sudah berlangsung dan memastikan perijinannya. Jika pemkot tidak melakukannya maka masyarakat berhak untuk melakukan gugatan.

“Masyarakat dan aktivis juga bisa melakukan *class action* untuk mengajukan gugatan. Sebelum gugatan ini lahir kami akan mengundang pemilik ulayat dan aktivis untuk memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan ke depan. Investigasi ini tidak berhenti sampai disini sebab ini akan berlanjut dan menjadi catatan yang akan kami laporkan. Ini juga upaya demi kepentingan masyarakat agar tidak kehilangan budaya mereka dan sekali lagi ini menjadi bagian dari tanggungjawab Komnas HAM,” pungkasnya.

Sekedar diketahui bahwa tahun 2012 lalu Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) bersama beberapa akademisi Uncen pernah mengadvokasi lokasi Teluk Yotefa akibat perencanaan yang salah dalam pembangunan Jembatan Yotefa. Upaya ini direspon oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar yang kemudian mengutus orangnya untuk melihat lokasi teluk dan disimpulkan bahwa ada kerusakan yang harus segera ditangani. **(JH/Ibn)**

Upaya Komnas HAM Menguatkan Organisasi dan Tata Laksana



Munafrizal Manan (Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM), Ahmad Nurkholis (Subkoordinator Bidang Tata Usaha Persuratan), tim Tata Usaha Persuratan dan para Sekretaris di lingkup Kesetjenan Komnas HAM dalam sosialiasi Peraturan Komnas HAM RI nomor 5 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (TND) dan Peraturan Komnas HAM RI nomor 4 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (KA) di ruang rapat khusus lantai 2 Komnas HAM RI Jakarta.

Sejak Maret 2019, Komnas HAM berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan reformasi birokrasi pada area 4 (empat) yaitu organisasi dan tata laksana melalui peningkatan indeks kearsipan. Tidak tanggung-tanggung, 4 (empat) instrumen kearsipan berhasil diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, antara lain Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Perkom) Nomor 4/2020 tentang Klasifikasi Arsip (KA), Perkom Nomor 5/2020 tentang Tata Naskah Dinas (TND), Perkom 6/2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Perkom Nomor 7/2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Komnas HAM RI.

Proses penyusunan keempat instrumen kearsipan melibatkan semua unit kerja dan dilakukan harmonisasi dengan Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir Desember 2020 lalu. Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan pun menyambut baik dan mendukung terobosan ini.

"Sistem kearsipan yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga arsip-arsip penting yang diciptakan oleh Komnas HAM agar tidak hilang karena itu merupakan suatu bukti otentik dan akan menjadi catatan sejarah dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia," imbuh Rizal saat membuka kegiatan sosialisasi Perkom TND dan KA yang dilakukan secara *hybrid* pada Kamis (11/02/2021).

Rizal mengatakan jika Komnas HAM berperan penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya mendorong penegakkan tersebut tentu saja didukung oleh dokumen-dokumen yang menjadi barang bukti suatu peristiwa dugaan pelanggaran HAM sehingga rangkaian peristiwanya menjadi terang benderang.

Subkoordinator Bidang Tata Usaha Persuratan, Ahmad Nurkholis yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi itu pun mengamini pernyataan Rizal. Menurutnya, Komnas HAM telah banyak menerima dan menyelidiki kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sehingga tidak sedikit dokumen dan bukti yang telah terkumpul.

Nurkholis berharap dengan disahkannya 4 (empat) Perkom ini dapat membenahi, menata dan mengelola arsip dinamis Komnas HAM. "Jika dokumen tersimpan dan tertata rapi, tidak menutup kemungkinan Komnas HAM menjadi rujukan bagi lembaga maupun organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia," katanya.

Kegiatan sosialisasi TND dan KA mendapat respon baik dari para peserta yang hadir, baik secara *offline* di Komnas HAM maupun yang hadir secara *online* melalui *Zoom Meeting*. Peserta yang terdiri dari semua sekretaris Pimpinan, Anggota, Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro di lingkup Kesetjenan Komnas HAM memperlihatkan antusiasnya terhadap Perkom ini.

Selama sesi diskusi berlangsung, banyak pertanyaan yang dilontarkan para peserta. Nurkholis tidak hanya menjawab dan menjelaskan Perkom TND dan KA saja, namun juga memberikan contoh-contoh bentuk naskah dinas dan cara pemberian nomor surat sesuai dengan kode klasifikasinya.

Perlu diketahui, selain 4 (empat) Perkom tersebut, Subbagian Tata Usaha Persuratan telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Komnas HAM (Raperkom) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis. Pedoman ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis di Komnas HAM. Saat ini pun sudah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dalam sistem persuratannya. Adanya penunjukkan para staf pengelola arsip di setiap unit yang ada di Komnas HAM untuk menerapkan dan mendukung realisasi dari 4 (empat) Perkom tersebut. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mendorong kearsipan Komnas HAM lebih terorganisir yang berimplikasi pada peningkatan nilai evaluasi reformasi birokrasi Komnas HAM. (**AR/Ibn**)

Hari Perempuan Sedunia, Sebuah Cerita dan Refleksi



Ilustrasi Kesetaraan Gender (Sumber : Freepik)

International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia diperingati pada 8 Maret setiap tahunnya. Peringatan ini, kerap dijadikan momen bagi perempuan di setiap negara untuk mengungkapkan pencapaian perempuan di berbagai bidang serta menyuarakan aspirasi terkait kesetaraan gender, anti diskriminasi dan pencegahan kekerasan terhadap kaum perempuan.

Dalam catatan sejarah, Hari Perempuan Sedunia lahir dari tragedi kekerasan dan ketidaksetaraan terhadap kaum perempuan pada abad ke- 19. Di New York, Amerika Serikat pada 8 Maret 1857 perempuan buruh pabrik garmen di New York melakukan aksi demontrasi memprotes kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah gaji di bawah rata-rata. Tepat 50 tahun kemudian peristiwa ini kembali terjadi pada 8 Maret 1907. Saat itu lebih dari 15 ribu perempuan buruh pabrik garmen melakukan demonstrasi di New York untuk menuntut hak berpendapat dan berpolitik.

Pada 1910 salah satu tokoh perempuan yang turut menjabat sebagai Ketua Perempuan Kantor dari Partai Sosial Demokrat di Jerman, Clara Zetkin, mengusulkan gagasan untuk menetapkan Hari Perempuan Internasional. Menyambut gagasan tersebut, pada Maret 1911 Hari Perempuan Internasional pertama kali dirayakan di Austria, Jerman, Denmark dan Swiss. Hingga akhirnya pada 1975, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan bahwa Hari Perempuan Internasional diperingati pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, kita memiliki banyak pahlawan perempuan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dhien, Martha Christina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Rasuna Said dan lain-lain.

Perjuangan kesetaraan gender hingga saat ini masih berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aspirasi yang disuarakan oleh kaum perempuan, serta keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang.

Perjuangan kaum perempuan memang tidak mudah. Dalam berbagai situasi, perempuan masih menjadi subjek diskriminasi. Dalam hal ini, perempuan tidak hanya menjadi korban, namun juga sering disalahkan menjadi penyebab oleh berbagai pihak. Adanya pembakuan stigma/*stereotipe* gender terhadap perempuan di masyarakat, dinilai menjadi salah satu faktor penyebab kondisi tersebut.

Dampak dari pembakuan peran gender terhadap perempuan di masyarakat, juga dirasakan langsung oleh salah seorang Penyuluh senior Komnas HAM yang memiliki ketertarikan pada isu perempuan, Eka C. Tanlain. Eka melihat sendiri di masa kecilnya, bagaimana sang ibu, perempuan dan anak pertama di dalam keluarganya, dituntut untuk mengerjakan banyak sekali pekerjaan domestik. Padahal, sang ibu juga merupakan seorang perempuan pekerja dan masih harus mengurus keluarga kecilnya sendiri.

"Saya melihat langsung kondisi ini dan muncul rasa penasaran. Namun, jawaban yang saya terima, perempuan memang harus menurut. Rasanya ada yang tidak benar," jelas Eka saat dihubungi redaksi melalui media sosial. Suatu ketika, salah seorang sahabat karibnya, mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik, psikis, verbal dan ekonomi. Hal ini membuatnya semakin tergerak mendalami isu gender dan perempuan serta berusaha berkontribusi pada kesetaraan, walau sekecil apapun itu.

Terkait KDRT, Eka melihat saat ini masih banyak yang menganggapnya sebagai sebuah privasi. Meskipun sudah ada peraturan atau kebijakan yang mengatur, namun pada tataran implementasi masih jauh dari yang diharapkan.

"Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sudah lama juga ada pengarusutamaan gender. Namun, masih banyak kebijakan kita yang tidak ramah gender, sehingga cita-cita mencapai masyarakat yang setara dan adil masih jauh dari harapan. Namun sekecil apapun perubahan, harus tetap kita apresiasi serta pertahankan untuk maju," harapnya.

Dalam rangka hari perempuan sedunia ini pun, Eka memiliki pesan tersendiri kepada seluruh perempuan di Indonesia. "Kesetaraan gender itu, tidak hanya perjuangan bagi kaum perempuan, namun perlu dilakukan bersama baik laki-laki, perempuan, dan *others* untuk mencapai masyarakat yang setara, adil serta sejahtera," pungkasnya. (**ARM/NS/Ibn**)